BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kegiatan

Aktifitas penyusun dalam pelaksanaan kuliah kerja lapangan (KKL) di Kantor Desa Cibening Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan pada tanggal Sembilan juli tahun 2012 sampai dengan tanggal tigapuluh satu bulan juli 2012, yang sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh program studi ilmu pemerintahan Unikom Bandung.

1. Pada minggu pertama 09-07-2012 / 13-07-2012 :
    a. Pada tanggal 09-07-2012 Saya mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan KKL kepada Kepala Desa yang bersangkutan.
    b. Pada tanggal 10-07-2012 Saya memulai berorientasi kepada seluruh staff / pegawai kelurahan dan sekaligus saya memohon bimbingan dari para staff / pegawai kelurahan, terutama pada staff / pegawai yang bertanggung jawab dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
    c. Pada tanggal 11/12-07-2012 Saya di suruh Pembimbing dari pihak kelurahan yang bertanggung jawab dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, memerintahkan saya untuk mengunjungi kantor PNPM Mandiri Pedesaan dan memperkenalkan tentang kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
    d. Pada tanggal 13-07-2012 Pembimbing membawa saya pada kantor tersebut untuk mengamati proses kerja kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, sekaligus saya memilih program apa yang akan saya amati dan teliti di dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan.
2. Pada minggu kedua 16-07-2012 / 20-07-12 :
    a. Pada tanggal 16/17-07-2012 Saya mengikuti pada awal MAD & MUSDES Sosialisasi mengenai kegiatan PNPM Mandiridalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) kepada masyarakat khususnya kaum perempuan. yang dilaksanakan oleh pihak Kelurahan Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta.

b. Pada tanggal 18-07-2012 Saya mencoba ikut untuk membantu pihak PNPM Mandiri Pedesaan dalam pembentukan kelompok yang diikuti oleh masyarakat setempat khususnya kaum perempuan, yang didalam 1 kelompok tersebut harus memiliki anggota min 10 orang sesuai dengan ketentuan – ketentuan pihak PNPM Mandiri Pedesaan.

c. Pada tanggal 19-07-2012 Setelah membantu untuk pembentukan kelompok SPP pada hari sebelumnya, kali ini saya mencoba untuk membantu beberapa kelompok yang sudah dibuat dan memiliki perencanaan usaha, untuk mengajukan proses (SPP) kepada PNPM Mandiri Pedesaan di dalam sebuah Musyawarah Khusus Perempuan (MKP).

d. Pada tanggal 20-07-2012 Pada hari berikutnya, saya masih pada kapasitas pembantu masyarakat khususnya kaum perempuan. Tetapi kali ini lebih pada proses pengubulan lebih jelasnya adalah masyarakat kaum wanita (yang sudah memiliki kelompok dalam (SPP) mengajukan dana SPP kepada PNPM Mandiri Pedesaan selama 10 bulan secara bertahap setiap bulanya.

3. Pada minggu ketiga 23-07-2012 / 27-07-2012 :

a. Pada tanggal 23/24-07-2012, Pada hari pertama di minggu terakhir, saya masih dalam kegiatan saya membantu dan mengajak perwakilan dari setiap kelompok yang sudah dibuat dan memulai usahanya untuk mempelajari perihal bunga/bulan dari kegiatan (SPP) sebesar 2%, yang disosialisasikan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan melalui jalur MAD Penetapan Usulan.

b. Pada tanggal 25-07-2012, saya membantu pihak PNPM Mandiri Pedesaan kembali untuk melihat perihal penilaian khusus rencana kegiatan dan penilaian kategorisasi kelompok.

c. Pada tanggal 26-07-2012, Pada beberapa hari kedepannya, saya mengamati penilaian yang dilakukan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan terhadap beberapa kelompok untuk dikelompokan pada kategori : Kelompok Pemula, Kelompok Berkembang, Kelompok

Siap atau Matang berdasarkan indikator – indikator yang sudah dibuat.

d. Pada tanggal 27-07-2012, Dan pada hari-hari menuju akhir pengamatan / penilitian, saya masih membantu pihak PNPM Mandiri Pedesaan untuk memonitoring dan supervisi terhadap kelompok – kelompok yang sudah mulai berkembang melalui jalur musdes pertanggung jawaban.

4. Pada minggu keempat 30-07-2012 / 31-07-2012 :

a. Pada tanggal 30-07-2012, Hari pertama pada minggu keempat ini, saya mengakhiri penelitian dengan berpamitan kepada seluruh staf/pegawai Kelurahan dan PNPM Mandiri Pedesaan, tak lupa juga saya memberikan salam perpisahan pada masyarakat setempat yang sudah mempercayai saya untuk menjadi mediator kepada PNPM mandiri pedesaan.

b. Pada tanggal 31-07-2012, Selain itu saya pun mempelajari materi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dalam program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang sudah saya dapatkan dari catatan dan pengalaman kecil saya.

3.2 Pembahasan Kuliah Kerja Lapangan (KKL)

Penulis dalam pembahasan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini, akan mengupas Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta yang dikaitkan dengan menggunakan teori dari Edward, dengan beberapa indikatornya yakni secara Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dari Desa Cibening Kabupaten Purwakarta. Tetapi sebelumnya penulis akan terlebih dahulu memberikan gambaran umum mengenai Desa Cibening Kabupaten Purwakarta.

3.2.1 Letak Geografis Desa Cibening

Desa Cibening merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Bungursari yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 24 Tahun 2000 tanggal 30 November 2000 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Babakan Cikao, Bungursari, Cibatu, Sukasari, Pondok Salam, dan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Desa Cibening terletak disebelah Utara Kabupaten Purwakarta dan posisinya terletak antara 107-30-107-40 BT dan 6.45 LS dengan suhu berkisar antara 26 C-30 C dan curah hujan rata-rata 1.200 mm 3.

Desa Cibening sendiri mempunyai luas 4.136,525 Ha, jumlah penduduk 37.841 jiwa, kemudian terdiri dari tanah darat 3.417,874 Ha dan tanah sawah 718,651 Ha dan secara topografi terdiri dari hamparan dataran rendah dalam bentuk rata dan bergelombang dengan ketinggian antara 25-500 m dari permukaan laut dalam lingkup batas administrative wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kota Baru Kabupaten Kerawang
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Purwakarta
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Babakan Cikao
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cempaka.

3.2.2 Visi dan Misi Desa Cibening

Desa Cibening memiliki Visi dan Misi, berikut penyusun paparkan visi dan misi tersebut

Visi Desa Cibening

Terwujudnya desa cibening sebagai kota terdepan dalam pengembangan wilayah yang senantiasa memberikan pelayanan yang prima dan memberdayakan masyarakat yang berkarakter.

Misi Desa Cibening

1. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, agama, dan perekonomian.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa
3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
4. Memberdayakan masyarakat
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Desa Cibening

Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal - usul desa, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional. Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota), merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan, merupakan mitra bagi pembangunan kota, dan sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah NKRI.

3.2.4 Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Cibening Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujua yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instant yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik , ekonomi dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Program yang dinamakan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat / kelembagaan local seperti: pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 milliar per kecamatan, tergantung dari pada jumlah penduduk tersebut.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada di bawah naungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri.Program ini didukung dengan pembiyaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih memfokuskan pada dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Sesuai dengan instruksi Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Serta Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Desa Cibening mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini di Desa Cibening. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) telah memberikan banyak pengetahuankepadapenyusun mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintahan Desa Cibening Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta.

Sebagaimana Visi Kelurahan Desa Cibening :

Terwujudnya desa cibening sebagai kota terdepan dalam pengembangan wilayah yang senantiasa memberikan pelayanan yang prima dan memberdayakan masyarakat yang berkarakter.

Dan Misi Kelurahan Desa Cibening :

Misi Desa Cibening

1. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan pendidikan, kesehatan, agama, dan perekonomian.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa
3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
4. Memberdayakan masyarakat
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan

Desa Cibening mengimplementasikan kebijakan PNPM dengan maksud untuk mengatasi masalah kemiskinan dan perekonomian di desa Cibening.

Sesuai dengan menurut Edward, dengan beberapa indikatornya yakni secara Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, saya

mengemukakan beberapa hal mengenai Implementasi Kebijakan PNPM di Desa Cibening.

3.2.5 Komunikasi Pemerintahan Desa Cibening Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan-tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan dengan para pelaksana. Konsintensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan intepretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh personel yang harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan. Jika para actor pembuat kebijakan telah melihat ketidak jelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Komunikasi menurut sangat lah penting dalam suatu organisasi, apabila ada sebuah perintah-perintah tidak sampai kepada tujuan yang dituju atau bisa diartikan salah, dan peringatan-peringatan tidak resmi dari seorang pemimpin ditafsirkan atau disampaikan dengan cara yang salah, maka kita akan menyadari bahwa masalah itu adalah masalah (“salah komunikasi”). Komunikasi merupakan salah satu fungsi sebuah kantor yang

fundamental dan merupakan suatu proses esensial bagi segala bentuk organisasi. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik atas komunikasi akan mengembangkan komunikasi tersebut . Semua organisasi di manapun perlu menerapkan sebuah komunikasi yang sangat tepat , sebagai proses yang penting dan esensial bagi pemimpin untuk mendorong lahirnya gagasan-gagasan kepemimpinan yang baik. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Masalah yang sebenarnya terjadi atau terdapat di Desa Cibening sendiri adalah kurang baiknya para anggota pegawai desa dalam mengkomunikasikan atau menyampaikan sebuah atau salah satu program Kebijakan Pemerintah yang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), tentang salah satu contoh Khasus yang berjudul tentang Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Jadi masyarakat pun tidak atau kurang memahami dan mengetahui apa yang dimaksud dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), yang diadakan oleh pihak pemerintah ini.

Masalah yang sebenarnya terjadi bukan terletak pada apakah pemimpin itu perlu berkomunikasi atau tidak, tetapi apakah pemimpin tersebut mampu mengadakan komunikasi dengan para pegawai-pegawainya supaya mereka bisa mengetahui bagaimana cara mereka supaya bisa menyampaikan sebuah program ini dengan sangat tepat. Komunikasi dengan sesama peserta program (di dalam ataupun di luar kelompok) maupun dengan petugas pelaksana program. Saya melihat sewaktu saya melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Intensitas komunikasi dengan petugas pelaksana program adalah banyaknya jumlah komunikasi yang terjadi antara kelompok yang satu dengan petugas pelaksana program, terutama mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), khususnya tentang masalah Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut. Sementara itu, intensitas komunikasi dengan sesama peserta program adalah banyaknya jumlah komunikasi yang terjadi, baik antara sesama anggota satu kelompok maupun dengan kelompok yang lainnya, terutama yang berkaitan dengan salah satu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), disitu juga menjadi salah satu timbulnya

pemicu banyaknya masyarakat semakin bingung dengan adanya program PNPM itu sendiri. Isi komunikasi yang dilakukan oleh peserta program juga menjadi pertimbangan pada aspek ini Komunikasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan sebuah program kebijakan itu sendiri.

Desa Cibening sendiri mengimplementasikan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta ini sudah cukup baik, namun masih saja banyaknya kekurangan, seperti dalam halnya komunikasi ini, koordinasi diantara pihak-pihak seperti masyarakat, Kecamatan khususnya bidang Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) tentang kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dan Pihak-pihak lain yang terlibat untuk melaksanakan kebijakan ini belum seluruhnya berjalan dan terhubung dengan baik. Dengan begitu Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening ini masih terus banyak kekurangan dan kesalahan diberbagai tingkatan. Untuk memperbaiki dan menjadikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan sukses menurut saya Kecamatan Desa Cibening perlu banyak perbaikan di dalam masalah komunikasi dan koordinasi. Supaya masyarakat bisa memahami atau mengerti dengan Program yang diadakan oleh pemerintah tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), salah satunya khususnya dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP),

3.2.6 Sumber Daya Pemerintahan Desa Cibening Dalam Mengimplementasikan Kebijakan PNPM di Desa Cibening

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi sebuah keberhasilan dan kegagalan implementasi, terutama tentang program yang di adakan oleh pemerintah, Implementasi sangat

tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tanganinya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya menusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program kebijakan pemerintah ini menyebabkan salah satu gagalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai Program PNPM itu sendiri, karena dengan terbatasnya fasilitas sangat sulit untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercayaakan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Salah satunya Kecamatan Desa Cibening, menurut saya masih banyak kekurangan dalam hal sumber daya manusianya, contoh kecil SDM yang seharusnya dapat berkerja secara maksimal dan profesional kenyataannya masih sangat kurang dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang ada.

Dari sumber daya anggaran dan peralatan, menurut saya Desa Cibening sudah sangat terpenuhi dan cukup menurut saya. Anggaran yang diberikan langsung oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi Jawa Barat menurut saya sudah sangat cukup untuk mengimplementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening ini dengan maksimal. Dengan anggaran yang ada, sumber daya peralatan juga dimiliki dengan cukup lengkap oleh Kecamatan Desa Cibening untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening.

Sumber Daya dalam tujuan dan ketentuan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) terlihat sangat baik, penyusun memperhatikan ketika pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Kelurahan Cibening Kabupaten Purwakarta, antusias dari pada sumber daya manusia atau masyarakatnya sangat baik dan menurut saya sangat tinggi dengan melihat ketika pensosialisasian tujuan dan ketentuan terhadap kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP), namun untuk sumber daya finansialnya masih dalam bentuk wacana dan masih belum jelas jadi penyusun hanya bisa melihat sumber daya manusia / masyarakatnya saja.

Penyusun telah menyadari bahwa tanpa adanya sumber daya, suatu kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja dan tidak akan berjalan secara atau dengan sangat efektif.

a. Tujuan Umum Dari Program SPP

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi sebuah kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan social dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kurang mampu atau yang perekonomiannya sangat rendah (miskin).

b. Tujuan Khusus Dari Program SPP

1. Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun social dasar.
2. Memberikan kesempatan kaum perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha simpan pinjam.
3. Mendorong penguatan kelembagaan Simpan Pinjam oleh kaum perempuan.

PNPM Mandiri Pedesaan sendiri dalam Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta Lingkup kegiatan PNPM Mandiri pedesaan Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta pada prinsipnya adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin pedesaan Cibening Kabupaten Purwakarta secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat Desa Cibening Kabupaten Purwakarta dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat Desa Cibening Kabupaten Purwakarta dengan didukung sumber daya yang ada dan upaya pelestarian kegiatan.

Adapun usulan kegiatan masyarakat Desa Cibening Kabupaten Purwakarta yang dapat didanai oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklasifikasikan atas empat jenis kegiatan yang meliputi :

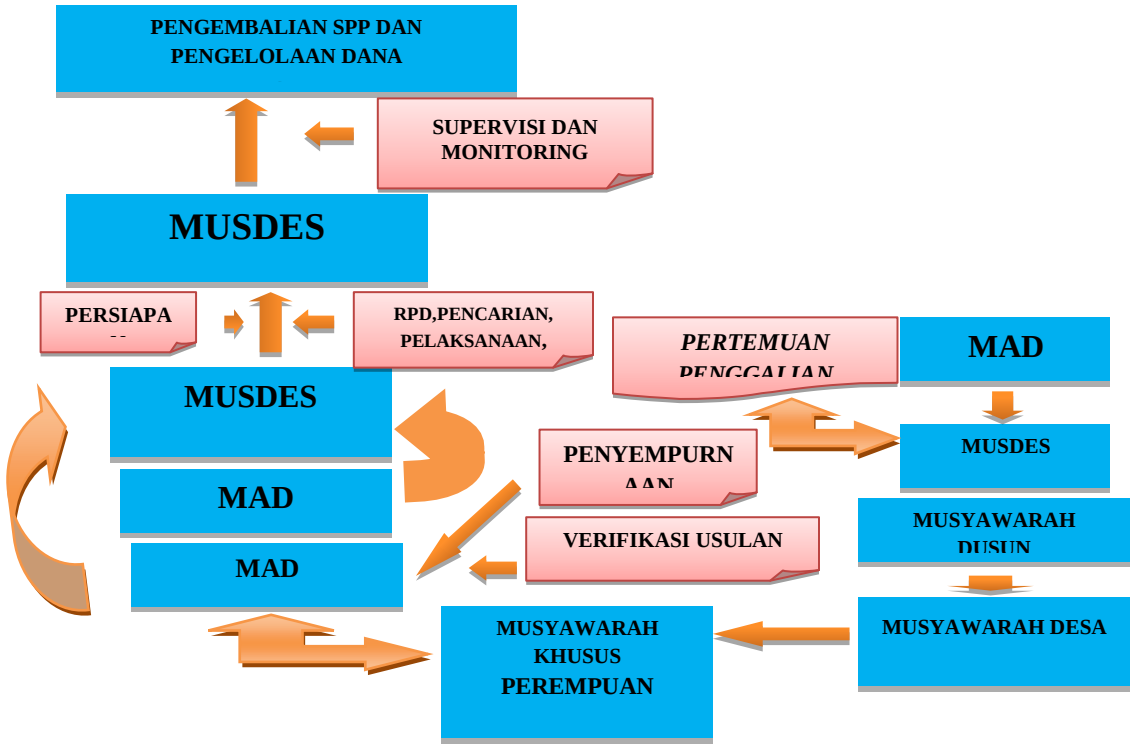
1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.

2. Peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat.
3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).

Ketentuan Untuk Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Sendiri adalah:

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang – kurangnya satu tahun.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Tabel 3.1
Alur Kegiatan SPP



Sumber: Pemerintahan Desa Cibening Kabupaten Purwakarta. 2012

3.2.7 Disposisi Pemerintahan Desa Cibening Dalam Mengimplementasikan Kebijakan PNPM di Desa Cibening

Disposisi adalah sebuah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tuju

menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini lah yang menurut saya amat berpengaruh membuat suatu kebijakan tidak akan bisa berjalan dengan sangat lancar atau baik, diimplementasikan dengan asal-asalan. Di negara kita masih diperlukan pendidikan kedisiplinan untuk menciptakan karakter sumber daya manusia yang kuat, pintar, taat, dan bisa bersikap profesional. Saya melihat Banyak para pegawai instansi pemerintahan yang berkerja dengan asal, lambat, tidak disiplin, dan tidak ada jiwa profesionalismenya. Mereka seperti menggampangkan semua hal yang padahal itu akan sangat berpengaruh terhadap suatu kebijakan yang harusnya mereka kerjakan. Hal tersebut dapat saya lihat pada saat saya melaksanakan KKL di Kecamatan Desa Cibening Purwakarta, para aparatur negara, pelayan masyarakat, pegawai pemerintahan atau apalah yang dapat disebut ini banyak sekali yang berkerja dengan tidak profesional dan malah menurut saya dibawah standar seorang aparatur negara. Hal ini yang harus dicari solusinya oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk memperbaiki sumber daya manusia agar semua hal yang berhubungan dengan perkerjaan untuk masyarakat dapat dikerjakan secara profesional dan tidak main-main.

Disposisi pada Mekanisme Pengelolaan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP) di Desa Cibening bila dilihat dan dirasakan oleh penyusun saat penyusun melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Kantor Desa Cibening Kabupaten Purwakarta, Disposisi mekanismenya masih jauh dari harapan, salah satu contohnya dapat dilihat dari masih sedikitnya para implementator Kelurahan dan PNPM Mandiri Pedesaan Cibening yang dapat memanfaatkan peran teknologi saat ini seperti

mengoprasikan perangkat Komputer dan In Focus yang telah tersedia, hanya satu atau dua orang saja para implementator yang dapat mengoprasikanya, hal tersebut tentunya menjadi hambatan akan mekanisme dalam pengelolaan kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (SPP). Disposisi Mekanisme tetap mengacu pada alur kegiatan program akan tetapi perlu memberikan beberapa penjelasan dalam tahapan sebagai berikut :

A. MAD Sosialisasi

Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku–pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan dapat memanfaatkan.

B. Musdes Sosialisasi

Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

C. Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun / kampung dengan proses sebagai berikut :

1. Identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan tersebut di atas termasuk kondisi anggota. Kader melakukan identifikasi perkembangan kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari : Kelompok pemula, kelompok berkembang, dan kelompok siap. Proses kategorisasi kelompok mengacu pada ketentuan kategori perkembangan kelompok. Menyiapkan daftar pemanfaat setiap kelompok beserta jumlah kebutuhan dan daftar rumah tangga miskin yang akan menjadi pemanfaat.

2. Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.

D. Musyawarah Desa dan MKP

Musyawarah ini merupakan tahapan seleksi di tingkat desa adalah:

1. Penentuan usulan desa untuk kegiatan SPP melalui keputusan musyawarah Khusus perempuan (MKP). Hasil keputusan dalam MKP merupakan usulan desa untuk kegiatan SPP.
   a. Hasil keputusan diajukan berdasarkan seluruh kelompok yang diusulkan dalam paket usulan desa.
   b. Penulisan usulan kelompok adalah tahapan yang menghasilkan proposal kelompok yang akan dikompetisikan di tingkat Kecamatan.
   c. Dalam penulisan usulan SPP paling tidak harus memuat hal sebagai berikut :
      a) Sekilas kondisi kelompok SPP
      b) Gambaran kegiatan dan rencana yang menjelaskan kondisi anggota, kondisi pemodalan, kualitas pinjaman, kondisi operasional, rencana usaha dalam satu tahun yang akan datang, perhitungan rencana kebutuhan dana.
      c) Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta social dan peta rumah tangga miskin.

E. Verifikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah :

1. Penetapan Formulir Verifikasi

   Penetapan formulir verifikasi merupakan proses penyesuaian dengan contoh format formulir yang telah tersedia. Contoh format formulir masih harus disesuaikan dengan kondisi local namun tidak mengurangi prinsip

dasar penilaian dengan model CAMEL *(Capital, Assets, Management, Earning, dan Liquidity)* yaitu : penilaian tentang pemodalan, kualitas pinjaman, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Contoh formulir ada di formulir PTO.

2. Proses pelaksanaan Verifikasi

   Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut:

   a. Pengalaman kegiatan simpan pinjam
   b. Persyaratan kelompok
   c. Kondisi kegiatan simpan pinjam, dengan penilaian :
      a) Pemodalan
      b) Kualitas pinjaman
      c) Administrasi dan pengelolaan
      d) Pendapatan
      e) Likuiditas (Pendanaan jangka pendek)
   d. Penilaian khusus rencana kegiatan
   e. Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverfikasi dengan daftar rumah tangga miskin.
   f. Penilaian kategorisasi kelompok.

Tabel 1.2
Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok :

Tabel Indikator Perkembangan Kelompok SPP				
Indikator	***Nilai = 1***	***Nilai = 2***	***Nilai = 3***	***Nilai = 4***
Ikatan Pemersatu	Ikatan pemersatu adalah domisili atau geografis Atau keluarga	Ikatan pemersatu kegiatan kemasyarakatan / ekonomi / simpan pinjam kurang dari satu tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam antara satu tahun sampai tiga tahun	Ikatan pemersatu kegiatan simpan pinjam lebih dari tiga tahun
	Belum	Mempunyai	Mempunyai	

Kegiatan anggota untuk tujuan bersama	mempunyai kegiatan secara rutin	kegiatan tetapi belum terencana dengan baik	kegiatan simpan pinjam yang masih berjalan dengan baik	Mempunyai kegiatan simpan pinjam yang terus berkembang dengan baik
Pengurus	Belum mempunyai pengurus yang disepakati oleh anggota	Pengurus belum mempunyai pertemuan tetapi belum secara rutin	Pengurus mempunyai pertemuan rutin tetapi belum mempunyai agenda pertemuan terencana	Pengurus mempunyai pertemuan rutin dan mempunyai agenda pertemuan yang terencana dengan baik
Aturan Kelompok	Belum ada kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama	Mempunyai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama tetapi tidak secara tertulis	Mempunyai aturan tertulis tetapi belum seluruhnya dilaksanakan	Mempunyai AD / ART yang telah dilaksanakan dengan baik
Iuran Anggota	Belum mempunyai iuran anggota secara wajib / tetap	Mempunyai iuran tetapi belum mencukupi untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib dan sukarela untuk operasional kelompok	Mempunyai iuran wajib, iuran sukarela dan simpanan sebagai modal usaha kelompok
	Belum mempunyai	Mempunyai administrasi	Mempunyai administrasi	Mempunyai

Administrasi Kelompok	administrasi secara tertulis	tertulis tetapi belum mempunyai laporan tertulis	tertulis dan mempunyai laporan tertulis tetapi belum secara rutin dipertanggung jawabkan	administrasi tertulis dan mempunyai laporan tertulis dan secara rutin dipertanggung jawabkan

Sumber : Desa Cibening 2012.

Dengan memperhatikan indicator-indikator tersebut di atas dan memberikan nilai pada setiap indicator kemudian menjumlahkan nilai maka terhadap kelompok dapat dikatagorikan menjadi:

1. Kelompok Pemula adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indicator sampai dengan 9 (Sembilan)
2. Kelompok Berkembang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator diantara 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas)
3. Kelompok Siap/Menantang adalah jika hasil penjumlahan nilai tiap-tiap indikator diatas 18 (delapan belas).
4. Pembuatan Berita Acara *(BA)* Hasil Verifikasi, dalam *BA* tersebut mencantumkan rekomendasi-rekomendasi termasuk jumlah usulan kelompok apakah sudah dalam kewajaran, keterlibatan rumah tangga miskin sebagai pemanfaat, dan kategorisasi perkembangan kelompok.

F. MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model priorotas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi.Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaatan kategori rumah tangga miskin.

Dalam tahapan prioritas kebutuhan ini menilai usulan-usulan kelompok yang tergabung dalam paket usulan desa.Penilaian dilakukan dengan basis usulan kelompok sehingga jika ada kelompok yang tidak layak maka tidak secara otomatis menggurkan paket usulan desa tersebut,

kelompok yang dianggap layak tetap mendapatkan pendanaan sampai jumlah kuota BLM desa.

Pemeringkatkan dilakukan pada seluruh kelompok SPP tanpa memperhatikan asal desanya, sehingga ranking prioritas yang diperoleh merupakan peringkat kelompok bukan peringkat paket usulan desa atau desa. Hasil pemeringkatkan kelompok SPP sudah dapat menunjukkan kebutuhan pendanaan BLM untuk SPP sehingga sudah dapat ditentukan kelompok-kelompok layak yang akan didanai dari BLM. Untuk kelompok yang layak dan akan didanai BLM tahap selanjutnya adalah melakukan penyempurnaan dokumen usulan misalnya : KTP dan Perjanjian Pinjaman Prioritas kebutuhan kelompok SPP agar mempertimbangkan :

1. Keterlibatan rumah tangga miskin sebagai anggota dan pemanfaatan
2. Kategori tingkat perkembangan kelompok
3. Hasil Penilaian kelayakan kelompok pengusul yang dituangkan dalam Berita Acara TIM Verifikasi.
4. Pertimbangan lain yang mendukung pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan peningkatan kesempatan kerja/usaha.

G. MAD Penetapan Usulan

Pada tahapan ini keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat pemeringkatan dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD Perguliran.

H. Penetapan Persyaratan`

penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal :

1. Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan : Besar dana pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing, sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.
2. Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.
3. Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatiakan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaatan maupun tingkat kelompok.
4. Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

I. Pencarian Dana

Ketentuan pencarian dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pencarian melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2
2. Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok
3. Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi operasional UPK 2 % dan operasional desa 3 % dengan bukti kuitansi yang ditandatangani oleh ketua kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK
4. Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana
5. Kelompok menyerahkan kuitansi / tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.

J. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi di UPK

Pengelolaan kegiatan di tingkat UPK meliputi:

1. Pengelolaan dokumen UPK mencakup beberapa hal sebagai berikut :
2. Pengelolaan data kelompok dan peminjam / pemanfaat, pengelolaan proposal penulisan usulan dengan peta social, pengelolaan dokumen penyaluran : Kuitansi, SPPB.

3. Pengelolaan administrasi meliputi : Rekening pengembalian SPP, buku bantu bank SPP, buku kas harian SPP, kartu pinjaman.
4. Pengelolaan pelaporan sebagai berikut : laporan realisasi penyaluran, laporan perkembangan pinjaman – SPP, Laporan kolektibilitas – SPP, necara laporan operasional.

K. Pengelolaan Dokumen dan Administrasi Pada Kelompok

Hal-hal yang dikelola ditingkat kelompok meliputi : data-data peminjaman, dokumen pendanaan/kuintasi di kelompok maupun pemanfaatan, administrasi realisasi pengambilan pinjaman ke UPK, administrasi penyaluran dan pengembalian/kartu pinjaman pemanfaatan dan administrasi pinjaman pemanfaatan.

L. Penetapan Daftar Tunggu

Usulan kegiatan kelompok SPP yang belom terdanai oleh BLM tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan dafatr tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok yang termasuk dafta tunggu.

M. Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup :

1. Pelestarian Kegiatan

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah:

a. Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
b. Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri-pedesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan tranportasi.

1. Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok.
2. Pengembangan layanan kepada masyarakat
3. Pengembangan permodalan.

2. Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelolaan simpanan dan pinjaman professional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyaluran dan pengelolaan pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hokum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam.Fasilitas pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam pengelolaan Dana Bergulir.

3.2.8 Struktur Birokrasi Pemerintahan Desa Cibening Dalam Mengimplementasikan Kebijakan PNPM di Desa Cibening

Membahas pelaksana dalam suatu kebijakan, tidak dapat lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Kata “birokrasi” dapat diartikan mengandung pengertian: Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan, Cara bekerja atau pekerjaan yang lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya, dan sebagainya. Jadi birokrasi adalah jenis organisasi yang dirancang untuk menangani tugas-tugas administrasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis.

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Didalam struktur birokrasi

terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operatingprocedures* atau SOP).

Desa Cibening sebagai salah satu instansi yang menjalankan program yang dibuat oleh Pemerintah Pusat menurut saya sifat dan ciri-ciri tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi instansi tersebut. Pelaksanaan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Cibening belum berjalan dengan maksimal dikarenakan kinerja pegawai Kecamatan Desa Cibening yang kurang baik, mereka menurut saya masih lamban dan terlalu santai dalam mengerjakan segala hal. Dengan kinerja yang demikian wajar saja apabila sebuah program tersebut belum berjalan dengan maksimal, dikarnakan dari kinerja pegawainya sendiri kurang begitu baik dalam mengatasinya.

Struktur Birokrasi Ketentuan Pendanaan BLM di Desa cibening terlihat kurang baik, penyusun melihat ketika sedang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kelurahan dan PNPM Mandiri Pedesaan tersebut, struktur birokrasinya terlalu rumit dan kompleks sehingga membuat masyarakat sangat sulit dalam memahami sebuah hubungan dengan pihak terkait.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan untuk mendanai semua kegiatan, terutama salah satu program tentang kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), per kecamatan sendiri di danai maksimal 25% dari alokasi BLM. Dalam memberikan palayanannya kepada masyarakat Desa Cibening, Pemerintahan Desa Cibening memeberikan beberapa pelayanan:

1. Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
2. Terlembagakan, artinya dana kegiatan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

3. Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
4. Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi pada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.